

**PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN NAHDLATUL ULAMA
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM BERPARTISIPASI
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
(TINJAUAN FIQH SIYASAH)**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah.

Oleh:

JUWITA TRI UTAMI
NPM : 1421020184

Program Studi : Siyasah



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M

**PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN NAHDLATUL ULAMA
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM BERPARTISIPASI
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
(TINJAUAN FIQH SIYASAH)**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah.

Oleh

JUWITA TRI UTAMI

NPM: 1421020184

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H / 2018

ABSTRAK

Dewasa ini di Negara kita, rakyat berharap pada pemerintah agar dapat terselenggaranya *Good And Clean Governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Namun hal tersebut hanya akan menjadi mimpi belaka ketika unsur daripada Negara tidak berupaya dan saling mendukung dalam menciptakan pemerintahan tersebut. Terlebih peran Organisasi masyarakat yang merupakan mitra sebuah Negara dalam menyelenggarakan dan mengawasi pemerintahan, yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan partisipasi dalam mengawasi dan mendukung segala bentuk kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintahan.

Fiqh siyasah menghendaki terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, pemerintahan yang adil, transparan, bertanggung jawab dan menjunjung prinsip demokrasi. Hal ini telah dicontohkan dengan adanya piagam madinah yang pernah menjadi dasar hukum dalam mengatur kehidupan kelompok-kelompok di bawah pemerintahan Nabi Muhammad. Sejalan dengan hal tersebut peranan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih ada didalam Al-Qur'an dan hadist seperti memelihara persaudaraan, menjaga kesatuan dan persatuan Bangsa, memelihara nilai-nilai agama dan kebudayaan, menjaga kedamaian dalam masyarakat, serta berpartisipasi dalam mendukung pemerintahan . Organisasi masyarakat dalam aspek Fiqh siyasah dapat disamakan dengan konsep Ummah yang artinya sekelompok orang yang diikat oleh semangat persaudaraan dalam mencapai tujuan kemaslahatan.

Berdasarkan gambaran diatas maka rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana Peran Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih dan bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih.

Adapun tujuan dalam skripsi ini untuk mengetahui peranan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dan mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Nahdlatul Ulama kota Bandar lampung dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini di fokuskan pada analisis data melalui observasi dan wawancara agar mendapatkan data sesuai dengan pokok masalah yang diteliti. Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif,

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada dalam fenomena tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peranan yang dilakukan oleh nahdlatul ulama kota Bandar lampung dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih telah dilaksanakan melalui partisipasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat seperti mendukung program-program pemerintah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Juwita Tri Utami
NPM : 1421020184
Jurusan : Siyasa
Fakultas : Syari'ah
Judul : Peran Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyasa)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

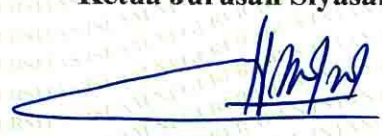
Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002


Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
NIP: 197408162003122004

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasa


Dr. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Peran Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Tinjauan Fiqh Siyasah** disusun oleh Juwita Tri Utami, NPM 1421020184, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal : Rabu, 14 Agustus 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. (.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)

Penguji I : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I (.....)

Penguji II : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. (.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**

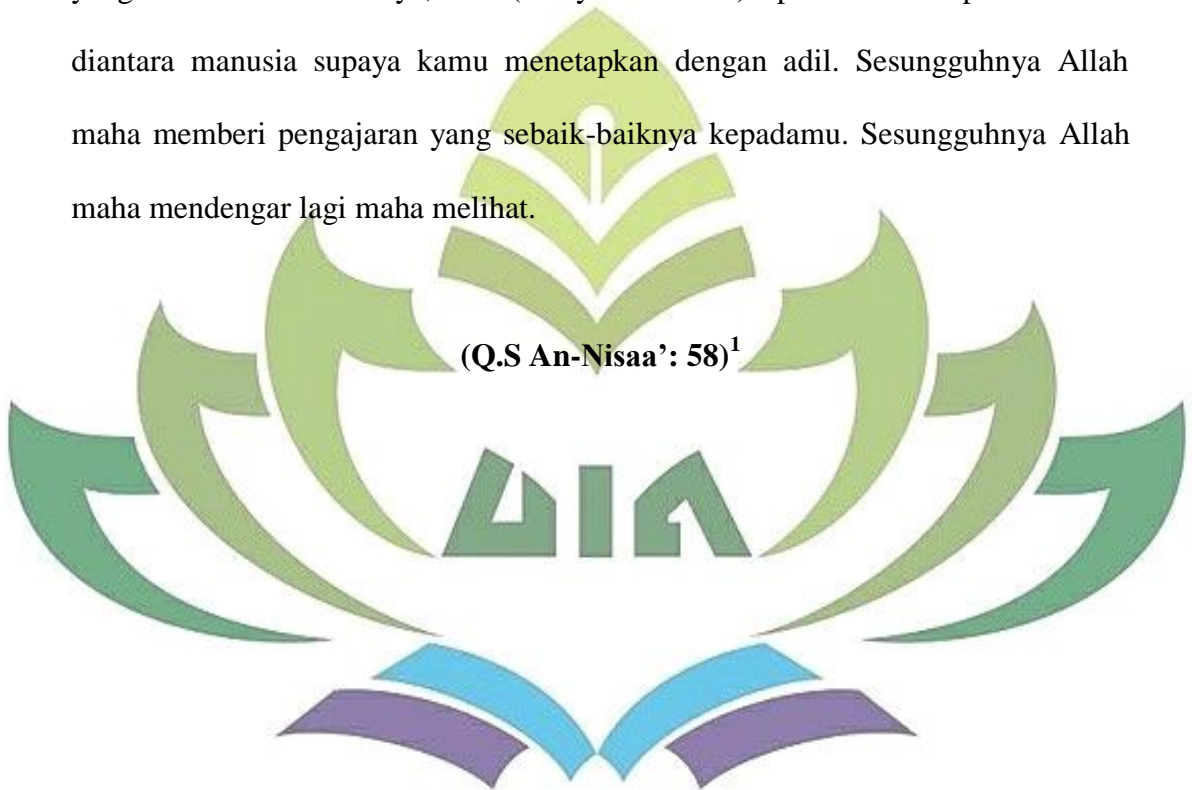
(.....)
Dr. Khairuddin, M.H.
NIP.19620221993031002

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.

(Q.S An-Nisaa': 58)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2015), hal 88

PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan Syafaatnya. Ucapan terimakasih ku persembahkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Sudirman Putra dan Ibunda Zuraidah, atas semua ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, serta membimbing penulis dengan penuh kasih dan sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kepada saudara-saudara kandungku Ayunda Helda Lena, Endang Novita Sari, serta Adinda Melisa, Septiana dan M. Huzairi terimakasih atas suport yang telah kalian berikan.
3. Teman seperjuanganku di UIN Raden Intan Lampung terutama yang berada di kelas Siyasah D yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas persahabatan yang begitu berharga.
4. Sahabat-sahabat dan Alumni PMII Rayon Syari'ah yang telah memberikan banyak pengalaman dan rasa kekeluargaan.
5. Pengurus PMII Komisariat Raden Intan Lampung Sahabat Dedy Indra Prayoga, Nobel M.Zinki, Lukmansyah, Yogi Prazani, Roy Indra Yusuf, Joko Supriyanto, Meydi Muhammad Putra, Sandi , Haris, dan vivi.

6. Sahabat-sahabat terdekat Oriza Wulandari, Reska ismayni, dan Mutia Ulfah.
7. Seluruh Keluarga besar Klasika (Kelompok Studi Kader) yang telah banyak memberikan wawasan dan pengetahuan dalam melihat realitas dunia dari berbagai sudut pandang.
8. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Juwita Tri Utami dilahirkan di Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan pada tanggal 05 Januari 1996, merupakan anak ketiga dari enam bersaudara putri dari pasangan Bapak Sudirman Putra dan Ibu Zuraidah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di:.

1. SDN 01 Banjit Kab Waykanan diselesaikan tahun 2007.
2. SMPN 01 Banjit Kab Waykanan diselesaikan tahun 2010.
3. Kemudian melanjutkan di SMAN 01 Banjit Kab Waykanan diselesaikan tahun 2013.

Penulis merupakan seorang aktivis perempuan yang sekarang menduduki jabatan Ketua Kaderisasi dalam Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri Komisariat Raden Intan.

Pada tahun 2014, penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata 1 (satu) jurusan Siyasah dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul "PERAN NAHDLATUL ULAMA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (TINJAUAN FIQH SIYASAH)".

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada jurusan Siyasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terimakasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan UIN Raden Intan Lampung.
2. Drs. Haryanto H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Dr
s. H. Chaidir Nasution, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
4. Drs. Susiadi, M.Sos.I., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak menyediakan waktu dan kesempatannya untuk memberikan bimbingan dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Frengki, M .Si selaku sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Siyasah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan;
9. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam skripsi ini mulai dari penelitian dilapangan terkhusus keluarga besar Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung.

10. A
yah dan Ibu yang selalu mendukung setiap langkahku serta do'a yang tak pernah henti dihaturkan disetiap sujudnya.

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT, skripsi ini memang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sangat diharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi intelektual bagi kemajuan pemikiran mahasiswa Fakultas Syari'ah serta masyarakat pada umumnya. Amin Yarobbal'Alamin

Bandar Lampung, 13 Juli 2019

Penulis

Juwita Tri Utami
1421020184

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemerintahan yang baik dan bersih.....	16
1. Pengertian Pemerintahan yang baik dan bersih	16
2. Kriteria Pemerintahan yang baik dan bersih.....	19
3. Landasan Filosofis dan Historis.....	22
B. Organisasi Masyarakat.....	24
1. Pengertian Organisasi Masyarakat.....	24
2. Tujuan dan Fungsi Organisasi Masyarakat.....	26
3. Hak dan Kewajiban Organisasi Masyarakat.....	27
4. Peran Organisasi Masyarakat di Era Demokrasi.....	28
C. Fiqh Siyasah.....	32
1. Pengertian Fiqh siyasah.....	32
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	37
3. Ummah.....	40

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum.....	43
1. Sejarah Nahdatul Ulama	43
2. Struktur Organisasi Masyarakat Nahdatul Ulama Kota Bandar Lampung.....	47

BAB IV ANALISIS

A. Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdatul Ulama Dalam Berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.....	50
1. Mengusulkan dan Mengawasi Program-Program Pemerintah Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat.....	51
2. Pemberdayaan Masyarakat(<i>Civil Society</i>).....	55
B. Pandangan Fiqh siyasah terhadap Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam Berpartisipasi mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan dengan memberi beberapa istilah yang terkandung di dalam skripsi ini untuk memberikan pemahaman dan menghindarkan penafsiran berbeda dikalangan pembaca. Adapun judul skripsi ini adalah: **Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdatul Ulama Kota Bandar Lampung Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyasah).**

Adapun pengertiannya antara lain:

1. Peran Organisasi Masyarakat

- a. Peran yang menurut kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain, proses, cara dan perbuatan memerankan.²
- b. Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan Aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

² Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta :Balai Pustaka, 1989), h.854.

berdasarkan pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

- c. Pemerintahan yang baik dan bersih memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.⁴

2. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.⁵

Jadi yang dimaksud dengan Peran organisasi masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih prespektif fiqh siyasah adalah segala Proses aspirasi , kepentingan dan, keterwakilan masyarakat dalam mengarahkan dan mengendalikan maupun memengaruhi urusan publik dalam sebuah Negara dan dilihat dalam sudut pandang ilmu tata negara Islam.

³ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi masyarakat

⁴ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *pendidikan kewarganegaraan (civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: Kencana, 20003), h.198.

⁵ Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*. (Jakarta: Erlangga , 2008), h.11.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul skripsi adalah:

1. Alasan Obyektif

Untuk melihat lebih jelas peran Organisasi kemasyarakatan dalam berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih tinjauan fiqih siyasah.

2. Alasan Subyektif

a. Pembahasan judul skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Jurusan Siyasah.

b. Tersedianya literatur, objek penelitian dan prasarana dalam penelitian ini, yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan pada pasal 1 dalam Undang- Undang ini yang dimaksud dengan Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan Aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian Organisasi masyarakat sebagai mitra sebuah Negara dalam menyelenggarakan dan mengawasi pemerintahan yang baik dan bersih yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan partisipasi dalam partai politik di Indonesia dan mengawasi segala bentuk kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh sebuah lembaga Negara. Kemudian organisasi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam dalam hal ini fiqh siyasah karena organisasi masyarakat mengajarkan musyawarah sebagai media pengambilan keputusan bersama selain itu ajaran tentang keadilan yang harus ditegakkan tanpa memandang status sosial dan latar belakang seseorang.

Istilah pemerintahan yang baik dan bersih atau disebut *Good and Clean Governance* merupakan kosa kata baru dalam perpolitikan di Indonesia karena muncul pada awal 1990-an, istilah ini memiliki pengertian segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian tersebut tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik dalam pemerintahan maupun non pemerintahan (lembaga swadaya masyarakat) dengan istilah *Good Corporate*. Bahkan prinsip-prinsip *Good And Clean Governance* dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dari yang paling sederhana hingga yang bersekala besar. Ada beberapa prinsip pokok *Good and Clean Governance* yang di rumuskan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk merealisasikan pemerintahan yang professional dan akuntabel salah satunya

adalah Partisipasi, asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Sejalan dengan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan salah satu tujuan dari implementasi *Good and Clean Governance* karena keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan lembaga pemerintahan pada akhirnya akan melahirkan kontrol masyarakat terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan. Maka Organisasi masyarakat merupakan elemen penting yang dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dalam hal ini yang menjadi penelitian penulis adalah organisasi masyarakat Nahdatul Ulama yang berada di Kota Bandar Lampung.

Nahdatul Ulama (kebangkitan Ulama atau kebangkitan Cendikiawan Islam) disingkat NU adalah sebuah Organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 januari 1926 dan bergerak dibidang keagamaan, pendidikan, Sosial dan Ekonomi. Nahdatul Ulama memiliki tujuan menegakkan Islam menurut paham Ahlusunnah Waljama'ah ditengah- tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Sejak terbentuknya hingga saat ini sudah pasti Nahdatul Ulama sebagai Organisasi Terbesar di Indonesia memiliki peranan penting terhadap pembangunan dan perpolitikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh

⁶ Ahmad Baso, *Agama NU untuk NKRI*, (Jakarta, Pustaka Afid, 2013), h.73

karenanya peran tersebut sejalan dengan pemikiran yang menjadi permasalahan penulis. Tapi bukan berarti Ormas diluar NU tidak memiliki peranan terhadap pembangunan di NKRI tetapi penulis Atas dasar itu merasa tertarik untuk memilih masalah ini melalui penulisan Proposal Skripsi yang berjudul **Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdatul Ulama Kota Bandar Lampung Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyasah).**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih ?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih ?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
- b. Untuk mengetahui Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih menurut tinjauan fiqh siyasah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum positif maupun hukum Islam selebihnya dapat dipergunakan untuk sebagai bahan bacaan (literatur) di samping literatur-literatur yang sudah ada tentang peran Organisasi masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

E. Metode Penelitian

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.⁷ Sedangkan menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.⁸ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁹ Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada yaitu tentang implementasi peran Organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama kota Bandar lampung dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih tinjauan fiqh siyasah.

⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 15.

⁸ Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 119.

⁹ Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.5.

b. Sifat penelitian

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada dalam fenomena tertentu”.¹⁰ Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana Peran Organisasi Masyarakat Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Tinjauan Fiqh Siyasah.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil data sekunder dan wawancara dengan pengurus dan Anggota organisasi NU kota Bandar Lampung.
- b. Data Sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.¹¹ Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari

¹⁰ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 115-116.

sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

Sedangkan data yang termasuk dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan peran Organisasi masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikolerasikan dengan data primer dalam penelitian ini. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.¹²

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Metode Wawancara

Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.159.

Wawancara yang dimaksud untuk memperoleh data tambahan dan memperkuat hasil kuesioner dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil.

b. Metode Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati.¹³ Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁴

Ada tiga jenis teknik pokok dalam observasi yaitu : Observasi partisipan dan observasi non partisipan; observasi sistematis dan observasi non sistematis; dan observasi eksperimen dan observasi non eksperimen. Adapun jenis observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, dimana peneliti turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyektif yang diobservasikan. Metode observasi ini adalah metode sekunder yang penulis gunakan untuk memperoleh data dan mengamati secara langsung tentang implementasi peran

¹³ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h.70.

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),

organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih Tinjauan Fiqh Siyasah.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan, atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya”, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdiri, struktur organisasi, jumlah pengurus dan anggota organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama di kota Bandar Lampung.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diduga atau diteliti. Populasi itu merupakan totalitas dari semua objek individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu Struktural Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”.¹⁵ Yakni untuk memilih responden dengan masalah yang tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah satu orang Ketua Nahdatul Ulama Kota bandar Lampung, satu orang Sekretaris Nahdatul Ulama Kota Bandar Lampung, 3 orang Anggota Nahdatul Ulama Kota Bandar Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid*, h.55.

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁶
- b. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- c. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.¹⁷

Setelah data terkumpul, dikoreksi, dievaluasi dan diolah yang sesuai dengan permasalahan. Setelah itu memberikan catatan khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur sehingga menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

¹⁶ Susiadi, *metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), h.115.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), h.45.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif analisis adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh lapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.¹⁸

Dalam menganalisis, peneliti mula-mula mengumpulkan data yang dapat dari hasil wawancara dengan menggunakan analisa kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan skripsi ini.

¹⁸Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia bIndonesia, 1998), h. 34.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good And Clean Governance*)

1. Pengertian pemerintahan yang baik dan bersih.

Istilah *Good and Clean Governance* di Negara Indonesia merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik. Ia muncul pada awal 1990-an. Secara umum istilah *Good and Clean Governance* memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersipat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.¹⁹

Menurut Sadjijono *Good and Clean Governance* mengandung arti segala kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita Negara.²⁰ sedangkan menurut IAN dan BPKP yang dimaksud dengan *Good and Clean Governance* adalah bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan.²¹ Dan menurut peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti *Good And Clean Governance* sebagai berikut :”kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi,

¹⁹ A.Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta Prenada Media Group, 2014), h.198.

²⁰ Neneng Siti Maryam “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, Vol VI No.1/ Juni 2016 h.4

²¹ *Ibid*, h.5

pelayanan prima, demokrasi, efesieansi, efektivitas, aupremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.²²

Dalam konteks Negara kita, *Good Governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksudnya baik yaitu pemerintahan Negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan pada masyarakat, sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efesien, transparan, jujur, an bertanggung jawab.

Namun dalam hal ini pengertian *Good and Clean Governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi semua lembaga baik pemerintahan maupun non pemerintahan (Lembaga Swadaya Masyarakat) dengan istilah *Good Corporate*.²³ Bahkan, prinsip- prinsip *Good and Clean Governance* dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dari yang paling sederhana hingga yang bersekala besar.

Pemerintahan yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, politik, serta ekonomi. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efesien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab.²⁴

²² *Ibid.* hlm,4

²³ *Ibid.* hlm, 199

²⁴ Neneng Siti Maryam “Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik”. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, Vol VI No.1/ Juni 2016 h.1

Sejalan dengan prinsip diatas, pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintah juga bisa dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang minimal tetapi dengan hasil yang maksimal.

Faktor lain yang tak kalah penting, suatu pemerintahan dapat dikatakan baik jika produktivitas bersinergis dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya.

Untuk mencapai kondisi sosial ekonomi di atas, proses pembentukan pemerintahan yang berlangsung secara demokratis mutlak dilakukan. Sebagai sebuah paradigm pengelolaan lembaga Negara, *Good And Clean Governance* dapat terwujud secara maksimal apabila ditopang oleh dua unsur yang saling terkait yaitu Negara dan masyarakat madani yang didalamnya terdapat sektor swasta. Negara dan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk mengubah pola pelayanan publik dari perspektif birokrasi elitis, menjadi birokrasi populis. Birokrasi populis adalah tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.²⁵

²⁵ *Ibid.*h.2

2. Kriteria Pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang berstandar pada prinsip-prinsip *good governance*, Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan Sembilan aspek fundamental (asas) dalam *good and Clean governance*²⁶ yang harus diperhatikan yaitu :

1. Partisipasi

Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi.

Paradigma birokrasi sebagai pusat pelayanan publik seyogyanya diikuti dengan deregulasi sebagai aturan, sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Efisiensi pelayanan publik meliputi pelayanan yang tepat waktu dengan biaya murah. Paradigma ini tentu saja menghajatkan perubahan orientasi birokrasi yang dilayani menjadi birokrasi yang melayani.

2. Penegakan Hukum

²⁶ A.Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta Prenada Media Group, 2014), h.200

Asas penegakan hukum yang dimaksud adalah pengelolaan pemerintahan yang profesional harus didukung dengan oleh penegakan hukum yang berwibawa. Tanpa ditopang oleh sebuah aturan hukum dan penagakannya secara konsekuen, partisipasi publik akan menjadi tindakan publik yang anarkis. Publik membutuhkan ketegasan dan kepastian hukum. Tanpa kepastian dan ketegasan hukum proses politik tidak akan berjalan dan tertata dengan baik.

3. Transparansi

Asas transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya Good and Clean Governance, akibat tidak adanya prinsip transparansi ini menurut banyak Ahli Indonesia telah terjerambab dalam kubangan korupsi yang sangat parah. Agar tidak mengulangi kesalahan pada pengalaman masa lalu dalam pengelolaan kebijakan publik, khususnya di bidang ekonomi pemerintah disemua tingkatan harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses kebijakan publik.

4. Responsif

Asas responsif dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Good and Clean Governance bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, pemerintah harus memahamai kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya tetapi pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan etika sosial. kualifikasi etika individual menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki criteria kapabilitas dan loyalitas

profesional. Adapun etika sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

5. Konsensus

Asas Konsensus adalah bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Cara pengambilan keputusan konsensus selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, cara ini akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.

6. Kesetaraan

Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksana pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin dan kelas sosial.

7. Efektivitas dan Efisiensi

Untuk menunjang asas-asas yang telah disebutkan diatas, pemerintah yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial.

8. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah pertanggung jawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus

kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Inilah yang dituntut dalam asas akuntabilitas.

9. Visi strategis

Adalah pandangan-pandangan strategis untuk melewati masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi *Good and Clean Governance*. Dengan kata lain kebijakan apapun yang akan diambil hari ini harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau duapuluh tahun kedepan.

3. Landasan filosofis dan Historis pemerintahan yang baik dan bersih.

Menurut seorang filsuf bernama Plato Negara Ideal adalah Negara menganut prinsip mementingkan kebajikan.²⁷ Kebajikan menurut Plato adalah pengetahuan. Mereka yang berhak menjadi penguasa hanyalah mereka yang mengerti sepenuhnya prinsip kebijakan. Plato juga menyebutkan Negarawan yang pantas untuk memimpin Negara adalah filsuf. Dengan memiliki pengetahuan, seorang Negarawan akan mengetahui bagaimana penyakit dalam masyarakat dan memiliki kemampuan untuk membentuk Negara yang baik untuk masyarakatnya. Negara Ideal menurut Plato juga didasarkan pada larangan atas

²⁷ Dr.Akhyar Yusuf Lubis, *Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer* , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2016).h.28

kepemilikan Pribadi, seperti harta, uang, keluarga, anak dan istri yang disebut “nihilism sosial” oleh Robert Nisbet. Karena dengan adanya kepemilikan pribadi dianggap akan menimbulkan adanya kesenjangan sosial dan kecemburuan sehingga menjadikan seseorang memiliki harta pribadi yang tak terbatas. Sehingga menyebabkan terjadinya kompetisi yang tidak sehat dan mengacu pada masyarakat yang “individualism” hanya mementingkan kebutuhannya dan mengabaikan kepentingan orang lain. manusiapun menjadi makhluk yang egois dan tidak memiliki sifat “Altruism”.

Konsep tentang Negara yang baik sebenarnya bukan lagi sebuah wacana baru, namun penerapan *Good Governance* di Indonesia khususnya muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Penerapan *Good Governance* dilatar belakangi oleh dua hal yang sangat mendasar yaitu tuntutan eksternal dan tuntutan internal.

Namun istilah *Governance* tidak sama dengan *Government*. Ganie-Rohman mengemukakan bahwa konsep “*government*” merujuk pada organisasi pengelolaan berdasarkan pada kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintahan) konsep “*governance*” melibatkan tidak hanya sekedar pemerintahan dan Negara sehingga pihak-pihak lain yang terlibat juga sangat luas.²⁸ *Good governance* seharusnya bukan lagi menjadi wacana baru namun merupakan suatu asas atau prinsip yang telah berusia ratusan

²⁸ Neneng Siti Maryam “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, Vol VI No.1/ Juni 2016 h.5

tahun dan seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintah dalam bernegara demokrasi, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat tanpa memandang status sosialnya.

B. Organisasi Masyarakat (Ormas)

1. Pengertian Organisasi Masyarakat

Organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2013, Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.²⁹

Organisasi masyarakat atau yang biasa disebut dengan ormas merupakan organisasi sosial, Organisasi sosial itu memiliki latar belakang dan atau ciri tertentu sebagai identitasnya, misalnya suku, etnis, agama atau identitas lainnya. Organisasi tersebut juga dibangun atas tujuan-tujuan tertentu yang

²⁹ Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi masyarakat.

kemudian diwujudkan dalam bentuk kepentingan-kepentingan organisasi³⁰. Dengan adanya identitas dan kepentingan ini, anggota-anggota di dalamnya kemudian menginternalisasi dan menjalankan nilai-nilai yang berlaku bagi kelompoknya, sehingga mereka atau orang-orang di luar kelompok akan memahami anggota-anggota tersebut sebagai sebuah organisasi sosial. menjelaskan bahwa makna dari eksistensi ormas tertuju kepada basis pergerakan kelompok kepentingan pada era sekarang ini.

Kelompok kepentingan merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan sifat, kepercayaan atau tujuan, yang memiliki kesepakatan bersama untuk mengorganisasikan diri dalam rangka melindungi dan mencapai tujuan bersama.³¹ Sedangkan menurut Ethridge dan Handelman dalam buku dasar-dasar ilmu politik dijelaskan bahwa kelompok kepentingan merupakan organisasi yang bertujuan untuk melakukan proses mempengaruhi kebijakan publik yang dianggap penting bagi anggota-anggota organisasi didalamnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa organisasi masyarakat diidentikkan sebagai kelompok kepentingan, artinya organisasi yang memiliki kepentingan berdasarkan tujuan dan fungsi dibentuknya organisasi tersebut. Ormas mempunyai peran dalam kehidupan demokratisasi masyarakat, antara lain memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sendiri. Mengkritisi kebijakan pemerintah

³⁰ Gatot Eddy Pramono 2015:5 *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol, 1.h.2

³¹ *Ibid*.h.3

agar tetap sejalan dengan tuntutan reformasi khususnya kebijakan yang menyangkut publik melalui dialog, seminar, atau kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Organisasi masyarakat memiliki tujuan dan fungsi masing-masing, namun secara khusus harus bersama-sama mencapai tujuan nasional. Mengingat ormas sangat beragam, peneliti akan menjelaskan secara umum tujuan dan fungsi dari ormas³² sebagai berikut :

2. Tujuan dan fungsi organisasi masyarakat.

a. Tujuan Organisasi Masyarakat

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
8. Mewujudkan tujuan Negara

b. Fungsi Organisasi Masyarakat

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi

³² Undang-Undang No.17 Tahun 2013

2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
3. Penyalur aspirasi masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Pemenuhan pelayanan sosial
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa.
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Hak dan Kewajiban Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat selain mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam rasa tanggung jawab kepada Bangsa dan Negara, setiap ormas juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat³³, terdapat peraturan tentang hak dan kewajiban dari organisasi masyarakat, yaitu:

Hak organisasi masyarakat

1. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
2. Mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi
3. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka

³³ Undang-Undang No.17 Tahun 2013

4. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi
6. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan Organisasi
7. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Kewajiban organisasi masyarakat³⁴

1. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia.
2. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma keasusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat.
3. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat
4. Melakukan keuangan secara transparan dan akuntabel
5. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara.

4. Peran organisasi masyarakat di era demokrasi

Organisasi masyarakat memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi dalam mewujudkan masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Organisasi masyarakat dibentuk secara sukarela berdasarkan tujuan untuk mendukung

³⁴ Undang-Undang No.17 Tahun 2013

dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. Ormas juga merupakan organisasi yang legal dimata hukum dan harus bekerja tanpa memiliki ketergantungan terhadap pemerintah. Di Indonesia keberlangsungan ormas diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara.

Setelah orde baru tumbang, akibat tuntutan demokratisasi terjadi perubahan paradigma dalam dinamika sosial politik, dari yang berbasis elit menjadi berbasis masyarakat. Pemerintahan yang pada mulanya bersifat sentralistik dengan diberlakukannya UU No 22/1999 dan kemudian UU No 32/2004 berubah menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik dengan tujuan agar lebih mengakomodir aspirasi dan mengembangkan daerah sesuai dengan potensi sosial ekonomi budaya setempat.³⁵ Dengan demikian ormas di era demokrasi ini, ormas memiliki fungsi strategis sebagai pelopor yang melayani perubahan sosial dalam penguatan ranah sipil. Dalam Undang-Undang No 17 tahun 2013 diatakan bahwa ormas berfungsi ³⁶:

³⁵ Ari Ganjar, *Jurnal pemikiran dan penelitian sosiologi*, vol 1, nomor 1 ,desember 2016,hlm.51

³⁶ Undang-Undang No.17 Tahun 2013

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan / atau tujuan organisasi.
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
3. Penyalur aspirasi masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat.
5. Pemenuhan pelayanan sosial.
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pilar demokrasi di Indonesia dalam pembangunan dibangun oleh tiga aktor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga aktor ini harus menjalin hubungan yang sinergis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun ormas harus mengambil posisi sebagai mitra yang kritis terhadap pemerintahan untuk lebih mengarahkan program-program pembangunan yang memberikan maslahat agar pembangunan menuju sasaran yang telah ditetapkan dan untuk kepentingan masyarakat. Kerja sama ormas dan pemerintah jangan diartikan sebagai hubungan mutualisme yang memprioritaskan keuntungan finansial bagi kedua belah pihak yaitu ormas dan pemerintah. Tetapi, kerja sama yang dimaksud antara ormas dan pemerintah ditujukan untuk membangun kebersamaan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat

dalam mensejahterakan masyarakat . Pemerintah pun perlu terbuka dalam menerima masukan dari ormas sehingga pemerintah dan ormas dapat saling berdampingan untuk membangun Negara³⁷. Sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2013 mengatakan ormas berkewajiban menjaga persatuan bangsa, kedamaian dalam masyarakat, dan turut berpartisipasi dalam mencapai tujuan Negara. Maka dengan undang-undang tersebut menjadi satu keharusan pemerintah dan ormas saling berSSinergi dalam mencapai cita-cita bangsa.³⁸ Karena ormas memiliki peranan penting dalam mewujudkan cita-cita Negara ormas memiliki fungsi sebagai penguat masyarakat sipil ketika berhadapan dengan Negara yang sering kali dikendalikan oleh kekuatan modal dan elit-elit politik. Beberapa fungsi ormas antara lain :

1. Sebagai organisasi yang mengelola aspirasi masyarakat.
2. Sebagai organisasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Sebagai organisasi yang mendukung dan melaksanakan program pembangunan.
4. Sebagai organisasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Sebagai organisasi yang mengawasi proses pembangunan.
6. Sebagai organisasi yang turut aktif memelihara dan menjaga ketertiban dan kermanan.
7. Sebagai organisasi yang mengembangkan keahlian masyarakat.

³⁷ Ari Ganjar, *Jurnal pemikiran dan penelitian sosiologi*, vol 1, nomor 1 ,desember 2016,hlm.53

³⁸ Undang-Undang No.17 Tahun 2013 pasal 21 ayat (b)

5. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya

1. Fiqh Siyasah

Kata “Fiqh Siyasah” yang tulisan bahasa Arabnya adalah

افقه السيا سي berasal dari dua kata yaitu kata *Fiqh* (الفقه) dan yang kedua

adalah *al-Siyasi* (السيا سي).

Kata fiqh secara bahasa adalah faham. Ini seperti yang diambil dari ayat Al-Quran , yakni:

قَالُوا يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا

أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ٩١

Artinya : “kaum berkata: Wahai Syu’aib, kami tidak memahami banyak dari apa yang kamu bicarakan”.³⁹

Secara istilah menurut ulama usul kata Fiqh berarti: “mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.⁴⁰

³⁹ QS. Hud : 91.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, h.18.

Sedangkan *al-siyasi* bila, secara bahasa berasal dari “سا س - يسو س - سيا سة”

yang memiliki arti mengatur (ا مر / دبر) seperti di dalam Hadits:

Artinya : “Adanya Bani Israil itu diatur oleh nabi-nabi mereka, yaitu nabi mereka memimpin permasalahan mereka seperti apa yang dilakukan pemimpin pada rakyatnya”.

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud Fiqh Siyasah. Maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata Fiqh secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi islam. Secara etimologis (bahasa) Fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁴¹

Kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab, kata Siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, kepengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan.

Apabila digabungkan kedua kata Fiqh dan al-siyasi maka Fiqh Siyasah yang juga dikenal dengan nama *siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti:

1. Menurut Imam Al-Bujairimi, Fiqh Siyasah adalah memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur dengan cara memerintah mereka

⁴¹ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993) h. 21.

dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan menuju kemaslahatan.⁴²

2. Menurut Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, atau Lembaga Kementrian, Fiqh Siyasah adalah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.⁴³
3. Menurut Imam Ibn 'Abidin, Fiqh Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.⁴⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam fiqh siyasah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu yang pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.⁴⁵ Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H.A. Djazuli, menyatakan bahwa fiqh siyasah itu mirip dengan ilmu politik, yang mana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang

⁴² Slaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairima ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.t.), vol., H.178.

⁴³ Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t) vol 25, h.295

⁴⁴ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1987), vol. 3, h. 147.

⁴⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 28.

politik, yaitu negara yang pemerintahannya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.⁴⁶

Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, Fiqh Siyasah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariaty seperti yang di tulis Prof. A.A.Djazuli, bahwa Fiqh Siyasah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.⁴⁷

Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalankan politik di dalam hukum islam haruslah terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang *kulli*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting didalam Fiqh Siyasah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu: pihak yang mengatur, pihak yang diatur. Melihat unsur tersebut menurut Prof. H. A. Dzajuli, Fiqh Siyasah itu mirip dengan ilmu politik, yang mana di nukil dari Wirjono Prodjodiro bahwa⁴⁸ *“Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu Negara yang pemerintahannya bersifat eksekutif dan unsur masyarakat”* ini juga dibuktikan dengan definisi politik di dalam Pengertian Encyclopedia:

⁴⁶Wirjono Prodjodikotro, *Asas-asas Ilmu Negara dan politik* (Bandung: eresco, 1971), h. 6.

⁴⁷ A. Djazuli, *Op.Cit.* h.28

⁴⁸ Wirjono Prodjodikiro, *Op.cit.* h. 6

“Political Science: the academic discipline which describes and analyses the operations of government, the state, and other political organizations, and any other factors which influence their behavior, such as economics. A major concern is to establish how power is exercised and by whom, in resolving conflict within society”

Yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah ilmu politik: disiplin akademis yang menggambarkan dan menganalisa operasi pemerintahan, negara, dan organisasi politik lainnya, dan faktor lain yang mempengaruhi perilaku mereka, seperti ekonomi. Perhatian utama adalah untuk menetapkan bagaimana kekuasaan dilaksanakan dan oleh siapa, dalam menyelesaikan konflik di dalam masyarakat”

Ternyata, memang di dalam definisi ilmu politik di sini, tidak disinggung sama sekali tentang kemashlahatan untuk rakyat atau masyarakat secara umum.

Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalali politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh kemandirian untuk senantiasa sesuai dengan syariah Islam, atau sekarang kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang *kullī*. Dengan demikian rambu-rambu Fiqih Siyasah adalah: Dalil-dalil *Kullī*, baik yang tertuang di dalam Al-Quran maupun Hadist Nabi Muhammad SAW, Maqashid al syari’ah, dan Kaidah-kaidah usul Fiqh serta cabang-cabangnya.

Oleh karena itu, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan *Siyasal Adl'iyah* itu bukanlah Fiqih Siyasah, hanya saja selagi *Siyasah Adl'iyah* itu tidak bertentangan dengan prinsip islam, maka ia tetap dapat diterima.

2. Ruang Lingkup

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. Fiqih Siyasah adalah ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu Fiqih. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqi mengungkapkan bahwa bahasan ilmu Fiqih mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang, bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.

Objek Fiqih Siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqih Siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu terprinci.

Menurut Imam Al-Mawardi, seperti yang dituangkan berdasarkan karangan Fiqih Siyasahnya yaitu *Al-ahkam al-Sultaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup Fiqih Siyasah adalah sebagai berikut:⁴⁹

a. Siyasah Dusruriyyah

b. Siyasah Maliyyah

c. Siyasah Qadla'iyyah

d. Siyasah harbiyyah

e. Siyasah Iddariyyah

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada surat An-Nisa Ayat 58 dan 59 yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkannya dengan adil” (QS. An nisa 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

⁴⁹ Ali bi Muhammad al-Mawardi, *Al-ahkam al Sulthaniyyah wa al wilayat al-Diniyyah* (Beirut: dar al-Kutb al-lamiyyah, 2006), Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dan dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib manaati Allah dan RasulNya serta mematuhi pemerintah. Dan dalam kitabnya tersebut Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup Fiqih Siyasah adalah sebagai berikut:

- a. Siyasah Qadla'iyyah*
- b. Siyasah Idariyyah*
- c. Siyasah Maliyyah*
- d. Siyasah Dauliyyah/siyasah Kharijiyyah*

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat Fiqih Siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemashlahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan Abdul Wahhab Khali'af mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. Siyasah Qadla'iyyah*
- b. Siyasah Dauliyyah*

c. *Siyasah Maliyyah*

Dalam Fiqh siyasah Organisasi masyarakat dikategorikan dalam konsep siyasah Dusturiyah yakni bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan Negara, dalam siyasah dusturiyah dibahas antara lain konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

3. Ummah

Kata “ummah” di Indonesia diartikan menjadi umat yaitu sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat, akan tetapi sering dipahami secara keliru oleh masyarakat dan tak jarang terabaikan dan tidak dianggap sebagai pengertian ilmiah, padahal tidak kurang orientalis W. Montgomery Watt dan Bernard Lewis, membahas konsep ini secara serius dalam karangan mereka.⁵⁰

Dalam *Ensiklopedi Indonesia* istilah “umat” mengandung empat macam pengertian yaitu : (1) Bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman.(2) Penganut suatu agama atau pengikut Nabi. (3). Khalayak ramai, dan (4). Umum seluruh umat manusia.⁵¹

Dalam terminologi islam, istilah ummah adalah sebuah konsep yang unik dan tidak ada padananya dalam bahasa-bahasa barat, pada mulanya, pemikir

⁵⁰ Lihat W.Mongtgomery Watt, Muhammad at medina, dan Bernard Lewis, *Political language of Islam*,(Chicago University Press,1998), terutama pada bab 3 dan 5

⁵¹ Hasan Shadili, pemimpin redaksi , *Ensklopedi Indonesia*, (jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1980), jilid 6.

politik dan orientalis barat mencoba memadankan kata ummah dengan kata nation atau bangsa dan kebangsaan.

Namun padanan kata ini dianggap kurang tepat dan akhirnya di padankan pula dengan kata komuniti (komunitas), namun term komunitas juga ternyata tidak terlalu tepat untuk disamakan dengan term ummah, menurut Abdur Rasyid Moten, guru Besar ilmu politik Universitas Islam Internasional Malaysia komuniti terlalu sederhana jika dibuat persamaan dengan term Ummah.⁵² Adapun perbedaanya komunitas merupakan suatu kelompok masyarakat yang mempunyai perasaan bersama dan memiliki identitas komunal. Kesamaan budaya, kesamaan wilayah, darah , suku, atau kebangsaan atau dari gabungan semua ini.⁵³ Adapun basis ummah tidak didasarkan pada ras, bahasa, sejarah, dan bergantung pada batas-batas wilayah geografis tertentu. Ummah bersifat universal, meliputi kaum muslim dan disatukan oleh ikatan ideologi yang kuat dan komperhensif, yaitu islam.⁵⁴ Dalam konteks fiqh siyasah dijelaskan tentang konsep ummah sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an dari gmbaran ini akan memudahkan kita memahami konsep ummah dalam konteks politik islam. Kata Ummah bersal dari kata amma-yaumu yang berarti menuju, menumpu, atau meneladani. Dari akar kata ini lahir kata lain yaitu kata ummu yang berarti ibu dan imam

⁵² Abdur Rahman Moten, political Science : *An Islamic Perspektive*, (USA: St.Marin Inc, 1996),h.63

⁵³ Ibid, h.64

⁵⁴ Ibid.h.65

yang bermakna pemimpin. Keduanya adalah teladan, tumpuan pandangan dan harapan bagi anggota masyarakat.⁵⁵

Menurut Ali Syari'ati, makna ummah berarti "jalan yang jelas" atau "sekelompok orang yang bermaksud menuju jalan".⁵⁶

Sementara dalam piagam madinnah, pemakaian kata ummah ini mengandung pengertian, yaitu Organisasi yang diikat oleh aqidah Islam. Ini terlihat pada bunyi pasal suatu piagam tersebut.⁵⁷

Dari Al-Qur'an dan piagam madinnah diatas dapat dicatat beberapa ciri esensi yang menggambarkan ummah (Islam) pertama ummah memiliki kepercayaan kepada Allah S.W.T dan keyakinan kepada Nabi Muhammad S.A.W pendek kata anggota ummah diikat oleh islam ini yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok lainnya. Namun Islam memberikan identitas pada ummah yang mengajarkan semangat universal. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia seluruhnya adalah sama. Tidak ada perbedaan antara manusia atau kelompok dengan manusia atau kelompok lainnya. Kecuali ketaqwaan (QS. Al-Hujurat, 49:13). Universalitas Islam ini menolak pembatasan-pembatasan umatnya berdasarkan suku kelompok, komunitas, dan batas-batas wilayah. Maka secara alamiah ummat islam juga bersifat

⁵⁵ M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an : *Tafsir Maudu'i atas berbagai persoalan umat*, (Bandung :Mizan, 1996), h.325.

⁵⁶ Ali Syari'ati, *ummah dan imamah*, terjemah Muhammad Faisol Hasanudin dari *Al-qur'an al-ummah wa al-imamah*, (Bandarlampung-jakarta: YAPI, 1990),h.36

⁵⁷ Pasal tersebut berbunyi : *innahum ummatu wahidah min duni al-nas* (sesungguhnya mereka suku Quraisy dan penduduk asli madinnah) adalah sebuah ummat, yang berbeda dengan komunitas manusia lain.

organic. Kesatuan organik ini diikat oleh semangat persaudaraan seiman. Dari esensi tersebut dapat ditegaskan bahwa umat islam dibangun diatas dasar-dasar semangat aqidah yang kukuh, persamaan mutlak setiap manusia, keteladanan, kemanusiaan, penghargaan atas hak-hak individu dan penolakan terhadap primordialisme.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung.

1. Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul ulama lahir sebelum Indonesia merdeka, sejarah NU diwarnai dengan perlawanan terhadap kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan. Setelah berdirinya Nahdlatul Wathan (kebangkitan tanah air), tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujjar (pergerakan kaum saudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat.⁵⁸

Terbentuknya organisasi – organisasi sebagai basis pendirian NU pada tahun 1926 tersebut memberikan filosofi pendirian NU sebagai Organisasi Islam yang mencakup pemberdayaan kenegaraan, sosial politik, dan perekonomian. Pada masa sebelum kemerdekaan peran NU memang lebih banyak dalam hal bela Negara dan keagamaan khususnya membela keberagaman dan menolak pembatasan bermadzhab serta menolak penghancuran warisan peradaban.⁵⁹

Pada masa persiapan kemerdekaan, peran NU sangat besar pada perumusan fondasi konstitusional dalam pembentukan bangsa. NU dalam

⁵⁸ Moh Mukri, M.Ag,Dkk, *NU Mengawal Perubahan Zaman* (Bandar Lampung : LTN PWNU Lampung, 2016),h.11

⁵⁹ *Ibid*,hlm.12

hal ini merupakan gerakan islam yang menyetujui pancasila sebagai jalan tengah antara Negara dan Agama dan Negara sekuler.⁶⁰

Sampai saat ini NU merupakan organisasi masyarakat Islam pendukung pancasila sebagai dasar kebangsaan. Setelah kemerdekaan, pergolakan politik menyeret NU kearah polemik politik nasional, pada tahun 1952 NU keluar dari Masyumi dan menyatakan diri resmi sebagai partai politik. NU kemudian menjadi partai tersendiri dengan nama partai Nahdlatul Ulama dan mengikuti pemilu dari tahun 1955 dan 1971.⁶¹

Terpinggirkannya NU pada masa orde baru membuat NU memutuskan untuk berada pada posisi penekan. Keputusan NU untuk berposisi pada tataran kelompok penekan (tidak berpolitik praktis) dapat disimak dalam muktamar NU ke-27 di situbondo pada tahun 1984 yang kemudian lebih dikenal dengan gerakan kembali ke khittah 1926. Pada muktamar tersebut semakin diteguhkannya dua model politik NU yaitu kerakyatan dan kenegaraan yang merupakan pengalaman ideal dalam sejarah NU. Konsep kerakyatan dan kenegaraan ini dianggap tepat untuk NU sebagai organisasi keagamaan yang berorientasi pada kebaikan dan kepentingan umum (masalah ‘ammah).⁶²

Gerakan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah, serta

⁶⁰ *Ibid*, hlm.12

⁶¹ Moh Mukri, M.Ag,Dkk, *NU Mengawal Perubahan Zaman* (Bandar Lampung : LTN PWNU Lampung, 2016),h.13

⁶² Wawancara Ustad Khabibul Muttaqin, S.H.I sekretaris PC NU Kota Bandar Lampung pada tanggal 27 April 2019

merumuskan kembali metode berfikir, baik dalam bidang fiqh maupun sosial. selain itu juga merumuskan kembali hubungan NU dengan Negara.

Pada era demokrasi dan keterbukaan saat ini tidak dipungkiri lagi bahwa NU berada ditengah-tengah kekuasaan dan mempunyai kekuatan perubahan. Beberapa menteri Negara merupakan kader NU, ditambah banyak sekali kader NU mengisi posisi pemerintahan dan lembaga Negara baik di pusat maupun di Daerah khususnya Bandar Lampung.

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang berpengaruh di Indonesia. Sejarah mencatat, NU lahir dan besar jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejarah kelahiran NU bisa dilacak sejak kebangkitan Nasional yang diikuti oleh terbentuknya organisasi pergerakan, Nahdlatul Wathan (Kebangkitan tanah air) pada tahun 1916. Sampai akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan 31 Januari 1926.⁶³

Nahdlatul Ulama pertama kali dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini KH. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU, yang dijadikan dasar

⁶³ Moh Mukri, M.Ag,Dkk, *NU Mengawal Perubahan Zaman* (Bandar Lampung : LTN PWNU Lampung, 2016),h.13

dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik.⁶⁴

Nahdlatul Ulama kota Bandar Lampung adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang terdapat dalam lingkup wilayah Provinsi Lampung yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja) dan merupakan bagian dari organisasi keagamaan (Jami'yah Diniyyah Islamiyyah) Nahdlatul Ulama tingkat nasional.

Pada tahun 1964 Lampung memisahkan diri dari provinsi Sumatera Selatan, PBNU Membentuk mandataris menyusun pengurus NU Wilayah Lampung yang diketuai oleh KH. Muhammad Zakri.

Menurut K.H Hafi Pada saat berdirinya, tahun 1964 NU Wilayah Lampung hanya memiliki tujuh cabang yaitu: Teluk betung, Kota bumi, Menggala, Krui, Sukarame, Kota agung, dan Talang padang.⁶⁵

Kepengurusan NU Wilayah Lampung sejak tahun 1964 adalah sebagai berikut:

- a. Periode 1964 -1968 diketuai oleh H. Marhusen.
- b. Periode 1968 -1979 diketuai oleh KH. Zakri.
- c. Periode 1979 -1983 diketuai oleh H. Volta Jeli Panglima.
- d. Periode 1983 -1992 diketuai oleh Drs. Ramos Jaya Saputra.
- e. Periode 1992 -1997 diketuai oleh H. Khusnan Mustofa Gufron.
- f. Periode 1997-2002 diketuai oleh Drs. H. Khairudin Tahmid, M.H.
- g. Periode 2002 -2007 diketuai oleh KH. Ngaliman Marzuki.

⁶⁴ *Ibid*,h.14

⁶⁵ Wawancara Kyai Hafi, Tokoh NU Bandar Lampung pada tanggal 13 April 2019

- h. Periode 2012 -2017 diketuai oleh Sholeh Bajuri, S.H.I.
- i. Periode 2018 -2023 diketuai oleh Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag

2. Struktur Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung.

Adapun pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung masa khidmat 2017-2022 ⁶⁶ terdiri dari :

MUSTASYAR :

1. KH Badruzzaman
2. KH Cecep Sodri
3. KH. Hafiduddin Hanif, S.Pd.I.
4. Daeng Kadir
5. H. Juanda, S.Pd.I
6. Drs. Hi. Masdar, MM
7. Hi. Yuhadi, S.H.I
8. Hi. Madrus Salam
9. KH Sukmaja Drs
10. KH Heriyuddin Yusuf

SYURIAH :

Rais : KH Izzuddin Abdussalam

1. Wakil Rais : Habib Umar Muhdor Al-Hadad
2. Wakil Rais : Kyai Irmansyah, S.Ag.

⁶⁶ Wawancara Ustad Khabibul Muttaqin, S.H.I sekretaris PC NU Kota Bandar Lampung pada tanggal 27 April 2019

3. Wakil Rais : Ust Ahmad Sukandi
4. Wakil Rais : Ust Lulu'ul Ma'num
5. Wakil Rais : KH Hasan Hidayat, S.Pd.I
6. Wakil Rais : Tubagus Sudrajat
7. Wakil Rais : KH Rahmat Hidayat, S.Sos.I

Katib : H. Taufik Rahman, S.Ag.

1. Wakil Katib : Abdul Jalil, S.Sos.I
2. Wakil Katib : KH Mustofa
3. Wakil Katib : Rodi Nikmat, M.Kom.I
4. Wakil katib : Ismail Sholeh, S.Ag
5. Wakil Katib : Muhammad Anwar
6. Wakil Katib : Marsudi, S.Pd.I

TANFIDZIYAH

Ketua : Ichwan Adji Wibowo, S.Pt., M.M.

1. Wakil Ketua : Rudi Irawan, M.Si
2. Wakil Ketua : M. Yuliardi
3. Wakil Ketua : Drs. Hi. Maswi
4. Wakil Ketua : Imam Mahali, M.Kom.I
5. Wakil Ketua : Abdul Aziz, S.H., S.Pd.I, M.Pd.I
6. Wakil Ketua : Diki Hidayat, M.Sc
7. Wakil Ketua : Yudi Yusnandi, M.Si
8. Wakil Ketua : Ismail Sholeh, S.H.I
9. Wakil Ketua : H. Suryani, S.Sos., M.M.

10. Wakil Ketua : Wahyu Hidayat

11. Wakil Ketua : Sudibyo Putra

A'WAN :

1. Dr KH Muhammad Hakiki
2. Ust Ubaidillah, S.Pd.I, M.M
3. Habib Ali Ridho

Sekretaris : Khabibul Muttaqin, S.H.I

1. Wakil Sekretaris : Rudi Santoso, S.H.I, M.H.I
2. Wakil Sekretaris : Kusaeri Suwandi, S.Ag.,
3. Wakil Sekretaris : Entus Sofian, S.Kom
4. Wakil Sekretaris : Sunarto, S.Pd.I

Bendahara : Hi. Abdul Karim

1. Wakil Bendahara : Hi Aenul Wafa
2. Wakil Bendahara : Musannif Yasser Syamsurya, S.E., M.M
3. Wakil Bendahara : N. Rahman
4. Wakil Bendahara : Mayrozi, S.H.I
5. Wakil Bendahara : Rudi Kurniawan, STP, M.H

BAB IV

ANALISIS

A. Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

1. Mengusulkan dan mengawasi program-program pemerintahan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2013, Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila⁶⁷ sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Organisasi masyarakat diidentikkan sebagai kelompok kepentingan, artinya organisasi yang memiliki kepentingan berdasarkan tujuan dan fungsi dibentuknya organisasi tersebut. Ormas mempunyai peran dalam kehidupan demokratisasi masyarakat, antara lain memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sendiri. Mengkritisi kebijakan pemerintah agar tetap sejalan dengan tuntutan reformasi khususnya kebijakan yang menyangkut publik melalui dialog, seminar, atau kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Organisasi masyarakat memiliki tujuan dan

⁶⁷ Pasal 1 ayat (1), UU No 17 Tahun 2013 *tentang Organisasi Masyarakat*

fungsi masing-masing, namun secara khusus harus bersama-sama mencapai tujuan nasional. secara umum tujuan dan fungsi dari ormas sebagai berikut :

- a. Tujuan Organisasi Masyarakat
 - i. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
 - ii. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
 - iii. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - iv. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat
 - v. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
 - vi. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
 - vii. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
 - viii. Mewujudkan tujuan Negara
- b. Fungsi Organisasi Masyarakat
 - i. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
 - ii. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
 - iii. Penyalur aspirasi masyarakat
 - iv. Pemberdayaan masyarakat
 - v. Pemenuhan pelayanan sosial

- vi. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa.
 - vii. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Hak dan Kewajiban Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat selain mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam rasa tanggung jawab kepada Bangsa dan Negara, setiap ormas juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat, terdapat peraturan tentang hak dan kewajiban dari organisasi masyarakat, yaitu:

Hak organisasi masyarakat⁶⁸

1. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
Mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi
2. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka
3. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi
5. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan Organisasi

⁶⁸ Pasal 20 dan 21 ,UU No 17 Tahun 2013 *tentang Organisasi Masyarakat*

6. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Kewajiban organisasi masyarakat

1. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia.
2. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma keasusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat.
3. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat
4. Melakukan keuangan secara transparan dan akuntabel
5. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara.

Organisasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mengawasi dan mengawal kinerja pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakatnya tak terkecuali Organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung. Dalam skala nasional Jami'iyah NU telah banyak memberikan sumbangsihnya kepada umat islam dan Negara Indonesia. Dimana NU mampu menunjukkan prestasi yang tidak bisa dipandang remeh dalam perkembangan paham pemikiran keagamaan yang moderat, toleransi dan saling menghargai dan menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan etnis. Artinya peran NU tidak bisa diabaikan begitu saja dalam kancah perkembangan pemikiran agama, organisasi, dan pemerintahan.

Menurut Hidir Ibrahim, NU terlihat begitu dekat dengan pemerintah namun dalam prinsip landasan gerak yang ditanamkan oleh NU adalah sikap

menjaga dan mempertahankan pemerintahan yang berdaulat dan tidak otoriter terhadap masyarakatnya.⁶⁹ Banyak kader-kader NU yang potensial, kader tersebut ada diberbagai lini unsur kehidupan seperti bidang pendidikan, sosial, budaya, hukum, kesehatan, dan politik. Mereka yang menjelajah dikancah dikancah politik mampu membuka pintu gerbang kekuasaan, mulai dari menjadi pengurus partai politik kemudian menjadi anggota DPR RI, DPD, dan DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten atau kota diseluruh wilayah Indonesia.

Kemudian mengusulkan dan mengawasi program kerja pemerintahan dalam membangun kesejahteraan masyarakat Bandar lampung merupakan salah satu peranan yang harus dilakukan oleh Organisasi masyarakat khususnya Nahdlatul ulama kota Bandar lampung. Beberapa program kerja pemerintahan kota Bandar lampung yang didukung oleh Nahdlatul ulama adalah mensosialisasikan pemilu yang bersih dari isu SARA, relasi agama dan Negara ikut di kampanyekan oleh seluruh element Nahdlatul ulama kota Bandar lampung, beberapa Tokoh Nahdlatul Ulama yang sudah menduduki posisi terbaik di masing- masing bidang juga ikut andil mengawasi dan melaksanakan pesta rakyat beberapa pekan lalu. Tidak hanya itu peran Nahdlatul Ulama kota Bandar lampung juga terlihat nyata melalui pemberdayaan masyarakat dikota Bandar lampung seperti badan semi otonom Nahdlatul ulama yang menggalangkan dana untuk korban banjir yang terjadi di pesawaran dan korban tsunami dilampung selatan. Kemudian Nahdlatul ulama kota bandarlampung⁷⁰ gencar mengadakan

⁶⁹ Wawancara Sahabat Hidir Ibrahim, M.Si selaku ketua PW GP Ansor Lampung sekaligus Anggota DPRD Prov Lampung, pada tanggal 26 April 2019.

⁷⁰ Wawancara Bapak Rudi Irawan, M.Si wakil ketua bidang sosial dan Lingkungan Hidup PC NU Kota Bandar Lampung pada tanggal 24 april 2019

kegiatan seperti dakwah dalam mewujudkan kemaslahatan ummat seperti do'a dan istighosah untuk negeri yang diadakan tepat pada hari santri lalu.⁷¹

2. Pemberdayaan masyarakat (*Civil Society*)

Masyarakat madani dalam bahasa inggris *Civil Society* dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Menurut Anwar Ibrahim masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat.⁷² Sementara Dawam Rahardjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama.⁷³

Dalam perkembangannya masyarakat madani memiliki beberapa pilar sebagai penegak masyarakat madani yaitu institusi-institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas, pilar-pilar tersebut adalah :

1. Lembaga swadaya masyarakat
2. Pers
3. Supermasi Hukum
4. Perguruan Tinggi
5. Partai Politik

⁷¹ Wawancara bapak Ichwan Adji Wibowo, S.Pt., M.M. selaku ketua PC NU kota Bandar Lampung pada tanggal 19 April 2019

⁷³ Komarudin Hidayat dan azyumari azra. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani.(Jakarta :2006) hal.302

Maka kemudian melalui Pilar tersebut adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan lembaga sosial dengan berbagai perspektif kemudian menjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan Negara karena keanggotaan organisasi-organisasi mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Dalam hal tersebut masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam mengawal perubahan dan pembangunan sosial yang memiliki penghormatan terhadap HAM.

Menurut Siti Wuriyan Nahdlatul Ulama kota Bandar Lampung tentu telah lama memiliki cita-cita untuk mengawal perubahan dan pembangunan masyarakat Bandar Lampung melalui gerakan-gerakan sosial⁷⁴ masyarakat dan pengembangan masyarakat madani. Sedangkan menurut Khalida peranan yang dilakukan oleh NU adalah memberikan edukasi kepada pemuda dan masyarakat melalui gerakan pengkaderan, salah satu contoh Patayat NU Bandar Lampung yang selalu aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga agar terlibat aktif dalam proses demokrasi seperti pemilu, ketertinggalan kaum perempuan dalam konteks politik merupakan hal yang harus diubah agar masyarakat madani yang diharapkan dapat terwujud.⁷⁵ Tidak hanya itu NU Bandar Lampung juga kerap memberikan pemahaman Islam yang Toleransi melalui lembaga-lembaga Dakwah dalam acara-acara besar. Maraknya isu terorisme beberapa waktu lalu yang kemudian dianggap menjadi ancaman bagi Negara Indonesia.

⁷⁴ Wawancara kepada Siti Wuriyan, S.Sos.I, M.Kom.I selaku Anggota Lakpesdam NU Bandar Lampung Pada tanggal 24 April 2019

⁷⁵ Wawancara ketua Fatayat NU Lampung Ibu Khalida, S.H pada tanggal 13 April 2019

Melihat beberapa penjabaran diatas penulis dapat menarik benang merah, bahwa Nahdlatul Ulama kota Bandar lampung sebagai organisasi masyarakat yang mewujud sebagai kelompok kepentingan merupakan mitra bagi pemerintahan. Maka yang dapat dilakukan oleh Nahdlatul Ulama kota Bandar lampung dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih yaitu melalui peranan partisipasi yang kadang berperan untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui musyawarah, kemudian sekaligus harus menjadi kontrol kebijakan pemerintah melalui kritik.

B. Pandangan fiqh siyasah terhadap peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama kota Bandar lampung dalam berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih

Seringkali pemerintahan dianggap oleh khalayak umum sebagai hal yang buruk karena sering dianggap sebagai cara seseorang mencapai kekuasaan tertinggi kemudian mengeruk keuntungan pribadi dan kelompoknya. Anggapan negatif tersebut tidak pernah luput dari perilaku para aktor yang bermain dipanggung pemerintahan negeri ini. Anggapan tersebut kemudian dibenarkan dengan adanya birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang kaya akan struktur namun miskin fungsi, birokrasi yang tidak netral, birokrasi yang tidak transparan dan ditambah kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di negeri ini menjadi konsumsi masyarakat dalam media-media setiap hari.

Hal ini kemudian menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, karena krisis kepercayaan inilah yang menyebabkan

dipenghujung abad ke-20 muncul terminologi *Good and Clean Governance* sebagai respon untuk mengoreksi peranan pemerintah. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih tentu saja prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya harus ditegakkan baik oleh masyarakat apatah lagi oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah penyelenggara kebijakan. Menurut analisis penulis salah satu asas atau prinsip yang paling mampu dilakukan oleh organisasi masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama kota Bandar lampung yaitu asas partisipasi, karena asas ini merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga keterwakilan. Dan yang paling penting lagi bahwa asas partisipasi masyarakat ini dibangun diatas prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Kemudian Nahdlatul Ulama kota Bandar lampung sebagai organisasi masyarakat yang berada diluar kekuasaan pemerintahan juga telah mampu melakukan kritik apabila kebijakan yang dibuat pemerintah tidak Pro terhadap kepentingan dan kesejahteraan Rakyat.

Kemudian asas penegakan hukum juga sangat berperan dalam melindungi partisipasi masyarakat, tanpa didukung oleh penegakan hukum yang jelas maka partisipasi masyarakat dalam hal ini Nahdlatul Ulama kota Bandar lampung akan menjadi tindakan publik yang anarkis. Masyarakat membutuhkan ketegasan dan kepastian hukum tanpa hal tersebut proses menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih tidak dapat berjalan dengan lancar.

Asas transparansi merupakan unsur lain yang menopang terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, bisa kita kilas balik sejak Merdeka hingga

masa orde baru Negara kita berjalan tanpa sebuah transparansi hal inilah yang mengakibatkan Negara kita telah terjerambab dalam kubangan korupsi yang sangat parah, bagaimana tidak hampir seluruh peneyelenggara pemerintahan terjerat dalam kasus korupsi baik sekala daerah, maupun nasional. Hal inilah yang harusnya menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mendukung lembaga yang menegakkan pemeberantasan korupsi.

Asas responsif merupakan tugas pemerintah, bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakatnya, pemerintah harus memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Bukan malah menunggu masyarakat menyampaikan keinginan-keinginan mereka apalagi melalui cara kritik, sehingga akhirnya tidak terjadi hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyatnya.

Asas konsensus merupakan peranan penting juga yang harus diambil oleh Nahdlatul Ulama kota Bandar lampung bahwa apapun keputusan harus dilakukan melalui proses musyawarah. Hal ini agar dapat memuaskan semua pihak baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakatnya.

Asas kesetaraan merupakan peranan pemerintah dalam memperlakukan masyarakatnya, karena dalam hal ini pemerintah harus berlaku adil dalam pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin dan kelas sosial.

Asas efektifitas dan efesiensi juga merupakan peranan pemerintah dalam berdaya guna dan berhasil guna agar dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan rakyat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial.

Asas akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban pemerintah terhadap wewenang yang telah dipercayakan oleh masyarakat untuk mengurus kepentingan mereka. Setiap pejabat harus mempertanggung jawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

Asas terakhir yakni visi strategis yang juga merupakan peranan penting pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah juga harus mampu melihat masa yang akan datang, dengan kata lain apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau 20 tahun kedepannya.

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT sebagai kitab suci umat islam untuk menjadi pedoman hidup bagi umat islam. Meskipun Al-Qur'an diturunkan 1400 tahun yang lalu, namun isinya masih tetap relevan hingga saat ini. Al-Qur'an bagi umat islam adalah rumus cangguh yang didalamnya terdapat berbagai macam disiplin ilmu yang telah teruji kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern, beberapa diantaranya dalam bidang medis, teknologi, sosial, dan pemerintahan.

Dalam Al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan untuk menciptakan *Good and Clean Governance* pada pemerintahan. Namun di dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara eksplisit bahasan penerapan *Good and Clean Governance* pada pemerintahan. Namun nilai-nilai yang digambarkan oleh *Al-Qur'an* tentunya telah menggambarkan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan untuk mencapai kesejahteraan umat seperti konsep *accountability, transparency, justice* dan *equality*.

Ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang akuntabilitas atau berkaitan dengan petanggung jawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar *account* yang berarti hitung. Dalam agama islam setiap perbuatan yang dilakukan didunia akan di-hisab (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah diakhirat kelak.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ

Maka kewajiban setiap muslim untuk beriman terhadap hari akhir, oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya didunia ini, karena kelak setiap perbuatan akan mendapat balasannya dari Allah diakhirat.

Kemudian dalam Hadist yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim disebutkan “setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya”. (HR al-Bukhari no 2751 dan HR Muslim no 4228). Dalam kaitannya dengan pemerintahan yang baik adalah komitmen seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam proses menuju pemerintahan yang baik dan bersih.

Ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang transparansi dalam firman Allah telah menyebutkan “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah”.

Dengan adanya transparansi kinerja pemerintah masyarakat akan dapat mengetahui dan mengawasi progres dan tingkat keberhasilan pemerintah yang telah dicanangkan. Maka kemudian transparansi adalah komponen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang keadilan salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 16 yang artinya “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar dapat mengambil pelajaran”. Berkaitan dengan konsep pemerintahan yang baik dan bersih yaitu pentingnya keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal tersebut yakni keadilan sosial yaitu pemerintahan menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan kebijakan disegala bidang agar rakyat tidak merasa tertindas oleh kebijakan-kebijakan tersebut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Prinsip kesetaraan menjadi prinsip konstitusional terpenting yang menjadi dasar dari sistem suatu Negara. Hal ini mengisyaratkan bahwa prinsip kesetaraan yang ada dalam suatu komunitas yakni harus setara dalam hak, tanggung jawab, dan kewajiban yang dipikul tanpa mendiskriminasi orang lain karena perbedaan agama, suku, ras, dan kelompok tertentu.

Kemudian dalam sejarah pemerintahan Islam sendiri pemerintahan yang baik dan bersih diatur dalam konsep *siyash dusturiyyah* yakni *Ummah* dan hubungan timbal balik antara Rakyat dan pemerintahan.

Dalam konsep “ummah” di Indonesia diartikan menjadi umat yaitu sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat, akan tetapi sering dipahami secara keliru oleh masyarakat dan tak jarang terabaikan dan tidak dianggap sebagai pengertian ilmiah, padahal tidak kurang orientalis W. Montgomery Watt dan Bernard Lewis, membahas konsep ini secara serius dalam karangan mereka.⁷⁶

Dalam *Ensiklopedi Indonesia* istilah “umat” mengandung empat macam pengertian yaitu :

- 1) Bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman.
- 2) Penganut suatu agama atau pengikut Nabi.
- 3) Khalayak ramai, dan
- 4) Umum seluruh umat manusia.⁷⁷

⁷⁶ Lihat W.mongtgomery Watt, Muhammad at medina, dan Bernard Lewis, *Political language of Islam*,(Chicago University Press,1998), terutama pada bab 3 dan 5

⁷⁷ Hasan Shadili, *pemimpin redaksi* , *Ensklopedi Indonesia*, (jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1980), jilid 6.

Dalam terminologi islam, istilah ummah adalah sebuah konsep yang unik dan tidak ada padananya dalam bahasa-bahasa barat, pada mulanya, pemikir politik dan orientalis barat mencoba memadankan kata ummah dengan kata nation atau bangsa dan kebangsaan.

Namun padanan kata ini dianggap kurang tepat dan akhirnya di padankan pula dengan kata *comuniti* (komunitas), namun term komunitas juga ternyata tidak terlalu tepat untuk disamakan dengan term ummah, menurut Abdur Rasyid Moten, guru Besar ilmu politik Universitas Islam Internasional Malaysia *comuniti* terlalu sederhana jika dibuat persamaan dengan term Ummah.⁷⁸ Adapun perbedaanya komunitas merupakan suatu kelompok masyarakat yang mempunyai perasaan bersama dan memiliki identitas komunal. Kesamaan budaya, kesamaan wilayah, darah , suku, atau kebangsaan atau dari gabungan semua ini.⁷⁹

Adapun basis ummah tidak didasarkan pada ras, bahasa, sejarah, dan bergantung pada batas-batas wilayah geografis tertentu. *Ummah* bersifat universal, meliputi kaum muslim dan disatukan oleh ikatan ideologi yang kuat dan komperhensif, yaitu islam.⁸⁰

Dalam konteks fiqh siyasah dijelaskan tentang konsep *ummah* sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an dari gambaran ini akan memudahkan kita memahami konsep *ummah* dalam konteks politik islam. Kata *Ummah* bersal dari kata *amma-yaumu* yang berarti menuju, menumpu, atau meneladani. Dari akar kata ini lahir kata lain yaitu kata ummu yang berarti ibu dan imam yang bermakna pemimpin.

⁷⁸ Abdur Rahman, Moten, *political Science : An Islamic Perspektive*, (USA: St.Marin Inc, 1996), h. 63

⁷⁹ *Ibid*, h.64

⁸⁰ *Ibid*.

Keduanya adalah teladan, tumpuan pandangan dan harapan bagi anggota masyarakat.⁸¹

Menurut Ali Syari'ati, makna *ummah* berarti "jalan yang jelas" atau "sekelompok orang yang bermaksud menuju jalan".⁸²

Sementara dalam piagam madinnah, pemakaian kata *ummah* ini mengandung pengertian, yaitu Organisasi yang diikat oleh aqidah Islam. Ini terlihat pada bunyi pasal suatu piagam tersebut.⁸³

Dari Al-Qur'an dan piagam madinnah diatas dapat dicatat beberapa ciri esensi yang menggambarkan *ummah* (Islam) pertama *ummah* memiliki kepercayaan kepada Allah S.W.T dan keyakinan kepada Nabi Muhammad S.A.W pendek kata anggota ummah diikat oleh islam ini yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok lainnya. Namun Islam memberikan identitas pada ummah yang mengajarkan semangat universal. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia seluruhnya adalah sama. Tidak ada perbedaan antara manusia atau kelompok dengan manusia atau kelompok lainnya. Kecuali ketaqwaannya Universalitas Islam ini menolak pembatasan-pembatasan umatnya berdasarkan suku kelompok, komunitas, dan batas-batas wilayah. Maka secara alamiah umat islam juga bersifat organik. Kesatuan organik ini diikat oleh semangat persaudaraan seiman. Dari esensi tersebut dapat ditegaskan bahwa umat islam

⁸¹ M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an : *Tafsir Maudu'i atas berbagai persoalan umat*, (Bandung :Mizan, 1996), h.325.

⁸² Ali Syari'ati, *ummah dan imamah, terjemah Muhammad Faisol Hasanudin dari Al-qur'an al-ummah wa al-imamah*, (Bandarlampung-jakarta: YAPI, 1990), h. 36

⁸³ Pasal tersebut berbunyi : *innahum ummatu wahidah min duni al-nas* (sesungguhnya mereka suku Quraisy dan penduduk asli madinnah) adalah sebuah ummat, yang berbeda dengan komunitas manusia lain.

dibangun diatas dasar-dasar semangat aqidah yang kukuh, persamaan mutlak setiap manusia, keteladanan, kemanusiaan, penghargaan atas hak-hak individu dan penolakan terhadap primordialisme.

Sementara dalam hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat yaitu khalifah, kepala Negara atau imam hanyalah seorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat islam digambarkan secara simbolik dalam ajaran shalat berjama'ah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjama'ah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, fashah dan ketaqwaanya dari yang lainnya. Dalam posisi shalat tersebut imam berdiri memimpin shalat hanya beberapa langkah di depan makmum, ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam, seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa kepala Negara bukanlah pribadi yang luar biasa dan tidak pernah berbuat salah, maka kemudian kepala Negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya, ia justru harus berdekatan dengan rakyat supaya dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Contoh terbaik tentang kepala Negara setelah Rosulullah Muhammad wafat yakni ditunjukkan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar ibn al-Khaththab, kedua khalifah ini mampu menjadikan diri mereka sebagai Khadim *al-Ummah* (pelayan ummat) yang mengatur dan mengurus kepentingan umat islam.

Sejalan hal yang telah dijelaskan diatas penulis juga telah menyimpulkan bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk hidup berkelompok, justru islam mengajarkan untuk merawat kelompok-kelompok kepentingan masyarakat tersebut dalam prinsip kesetaraan. Hal ini sesuai dengan anggapan bahwa agama islam merupakan rahmat bagi semesta alam, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa agama islam sendiri memiliki banyak sekali kelompok yang merupakan aliran-aliran politik agama islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian lapangan dan analisis data yang dihimpun oleh peneliti dalam judul Skripsi Peran Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih Tinjauan Fiqh siyasah maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Organisasi masyarakat Nahdlatul ulama kota Bandar lampung dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih yaitu seperti mengawal dan mendukung serta mengawasi kebijakan pemerintahan kota Bandar lampung dalam menangkal isu SARA, melakukan dakwah kepada masyarakat adanya Toleransi dalam Islam yang Rahmatan lil A'lamin, kemudian membangun masyarakat yang sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan agar terciptanya masyarakat yang berperadaban.
2. Organisasi masyarakat dalam aspek Fiqh siyasah dapat disamakan dengan konsep Ummah yaitu Organisasi yang diikat oleh aqidah Islam dan memiliki pandangan yang jelas untuk tujuan kemaslahatan umat manusia. Sejalan dengan hal tersebut dalam fiqh siyasah islam telah mengumpamakan pemerintahan dan Rakyat seperti halnya shalat berjama'ah , Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjama'ah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman , fashah dan ketaqwaanya dari yang

lainnya. Dalam posisi shalat tersebut imam berdiri memimpin shalat hanya beberapa langkah di depan makmum, ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam, seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa kepala Negara bukanlah pribadi yang luar biasa dan tidak pernah berbuat salah, maka kemudian kepala Negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya, ia justru harus berdekatan dengan rakyat supaya dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi.

B. Saran–Saran

Organisasi masyarakat merupakan kekuatan yang memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintahan, agar pemerintah tidak lupa bahwa apapun itu kebijakan yang diterapkan adalah upaya untuk mensejahterakan rakyat, bukan malah sebaliknya. organisasi masyarakat juga merupakan sumber kekuatan yang harus terus mendukung pemerintahan yang adil dalam menentukan kebijakannya agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dan masyarakat yang menjunjung tinggi Nilai HAM dan Demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ubaedillah & Abdul Rozak, *pendidikan kewarganegaraan (civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta 2003.
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdur Rahman, Moten, *political Science : An Islamic Perspective*, (USA: St. Marin Inc, 1996)
- Ahmad Baso, *Agama NU untuk NKRI*, Pustaka Afid, Jakarta, 2013.
- Andi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Ari Ganjar, *Jurnal pemikiran dan penelitian sosiologi*, vol 1, nomor 1, desember 2016
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Surabaya : CV Penerbit Fajar Mulya)
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990, Jakarta : Balai Pustaka
- Dr. Akhyar Yusuf Lubis, *Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Gatot Eddy Pramono 2015:5 *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol, 1
- Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2005.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996.

Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Komarudin Hidayat dan azyumari azra. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*.(Jakarta :2006)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-X, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.

M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an : *Tafsir Maudu'i atas berbagai persoalan umat*, (Bandung :Mizan, 1996)

Narbuko, Cholid dan Abu Achadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah*, IAIN Raden Intan Lampung, 2010.

Neneng Siti Maryam “*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*”. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, Vol VI No.1/ Juni 2016

Prof.Dr.Moh Mukri, M.Ag,Dkk, *NU Mengawal Perubahan Zaman* (Bandar Lampung : LTN PWNU Lampung, 2016)

Salim, Peter dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, PT. Modern English pers, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Susiadi, *metodologi Penelitian*, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, Bandar Lampung, 2015.

Syarif , Mujaar Ibnu Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, Erlangga, Jakarta, 2008.

Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1

Peraturan PerUndang-Undangan

_____Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi masyarakat

_____Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi masyarakat.

Assalamualaikum, Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khabibul Muttaqin, S.H.I
 Umur : 31 tahun
 Pekerjaan : Sekretaris PC NU Kota Bandar Lampung
 Alamat : Kemiling, Bandar Lampung

Menerangkan Bahwa :

Nama : Juwita Tri Utami
 Npm : 1421020184
 Fakultas : Syariah

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi yang berjudul, Peran Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyasah)

Demikian keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Bandar Lampung, 27 April 2019

Narasumber

Assalamualaikum, Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kyai Hafi
 Umur : 54 tahun
 Pekerjaan : Tokoh NU Kota Bandar Lampung
 Alamat : Kaliawi, Bandar Lampung

Menerangkan Bahwa :

Nama : Juwita Tri Utami
 Npm : 1421020184
 Fakultas : Syariah

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi yang berjudul, Peran Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyasah)

Demikian keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Bandar Lampung, 13 April 2019

Narasumber

Assalamualaikum, Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hidir Ibrahim,M.Si ketua PW GP Ansor Lampung
 Umur : 33 tahun
 Pekerjaan : Ketua PW GP Ansor Lampung Sekaligus Anggota DPRD
 Prov Lampung
 Alamat : Gang Melati ,Rajabasa, Kota Bandar Lampung.

Menerangkan Bahwa :

Nama : Juwita Tri Utami
 Npm : 1421020184
 Fakultas : Syariah

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi yang berjudul, Peran Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyasah)

Demikian keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Bandar Lampung, 26 April 2019

Narasumber

Assalamualaikum, Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudi Irawan, M.Si
 Umur : 31 tahun
 Pekerjaan : Wakil Ketua Bidang Sosial Dan Lingkungan Hidup
 Alamat : ,Rajabasa, Kota Bandar Lampung.

Menerangkan Bahwa :

Nama : Juwita Tri Utami
 Npm : 1421020184
 Fakultas : Syariah

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi yang berjudul, Peran Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyasah)

Demikian keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Bandar Lampung, 24 April 2019

Narasumber

Assalamualaikum, Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ichwan Adji Wibowo, S.Pt., M.M.
 Umur : 32 tahun
 Pekerjaan : Ketua PC NU kota Bandar Lampung
 Alamat : Kemiling, Kota Bandar Lampung.

Menerangkan Bahwa :

Nama : Juwita Tri Utami
 Npm : 1421020184
 Fakultas : Syariah

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi yang berjudul, Peran Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyasah)

Demikian keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Bandar Lampung, 19 April 2019

Narasumber

Assalamualaikum, Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Wuriyan,S.Sos.I,M.Kom.I
 Umur : 29 tahun
 Pekerjaan : Anggota Lakpesdam NU Bandar Lampung
 Alamat : Bataranila, Raja Basa, Kota Bandar Lampung.

Menerangkan Bahwa :

Nama : Juwita Tri Utami
 Npm : 1421020184
 Fakultas : Syariah

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi yang berjudul, Peran Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyasah)

Demikian keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Bandar Lampung, 24 April 2019

Narasumber

Assalamualaikum, Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khalida,S.H
 Umur : 30 tahun
 Pekerjaan : Ketua Fatayat NU Lampung
 Alamat : Kemiling, Kota Bandar Lampung.

Menerangkan Bahwa :

Nama : Juwita Tri Utami
 Npm : 1421020184
 Fakultas : Syariah

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi yang berjudul, Peran Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyasah)

Demikian keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Bandar Lampung, 13 April 2019

Narasumber